

ABSTRACT

This research entitled "Implementation Policy Issuance Permit Sea Aquaculture Fishing Business (Study at UPTD Marine and Fisheries District Bunguran West Natuna Regency)". Taking this title backed by the existence of the problem that is, not optimal implementation of the policy issuance permit marine aquaculture fisheries business in the District Bunguran Barat Natuna Regency. Therefore, the researcher aims to find out the implementation in the issuance of sea fish aquaculture business permit through 4 (four) supporting policy implementation factors, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The method used is descriptive method. Source of data obtained through observation, interview and literature study. Informants in this research are UPTD Marine and Fishery apparatus Bunguran Barat District Natuna Regency and local fishermen community. In determining informant of researcher use purposive technique.

The result of the research shows that the government of Sub District of Bunguran Barat Natuna Regency has run the government policy, but there are still deficiencies and the inhibiting factor in the issuance of sea fish fishery cultivation business permit.

Based on the research, the conclusion is that the implementation of the permit for marine fisheries cultivation in Bunguran Barat District Natuna Regency has not been implemented properly. It is recommended that local governments optimize cooperation with the community so that the benefits and objectives of the implementation of local government policy on the issuance of permits for marine aquaculture can be done well.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Budidaya perikanan ikan laut (Studi di UPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna)”. Pengambilan judul ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yaitu, belum optimalnya implementasi kebijakan penerbitan izin usaha budidaya perikanan ikan laut di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi dalam penerbitan izin usaha budidaya perikanan ikan laut melalui 4 (empat) faktor implementasi kebijakan yang mendukung, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah aparat UPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dan masyarakat nelayan setempat. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna telah menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi masih terdapat kekurangan serta adanya faktor penghambat dalam penerbitan izin usaha budidaya perikanan ikan laut.

Berdasarkan penelitian kesimpulan yaitu implementasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan ikan laut di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna belum diimplementasikan dengan baik. Untuk itu disarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan kerja sama dengan masyarakat agar manfaat dan tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penerbitan izin usaha budidaya perikanan ikan laut bisa terlaksana dengan baik.